

Pendampingan analisis standar belanja: Pengendalian anggaran dan kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019

Rahmawati*¹, Marwah Yusuf²

Universitas Muhammadiyah Palopo¹
STIEM Bongaya Makassar²

*e-mail korespondensi: rahmawati345@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengabdian ini membahas pendampingan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya usulan belanja dan indikator kinerja dalam ASB. Metode pelaksanaan mencakup pengumpulan data sekunder dan primer, serta analisis menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan ini berhasil memberikan pemahaman yang mendalam kepada mitra terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi besarnya usulan belanja, seperti perbedaan jenis kegiatan, target kinerja, langkah-langkah penyelesaian kegiatan, kebutuhan objek belanja, harga satuan, dan dasar penurunan dan penghitungan usulan belanja. Selain itu, mitra juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang indikator kinerja dalam ASB, termasuk masukan, keluaran, efisiensi, kualitas, dan hasil. Implementasi praktis dari pengetahuan ini terbukti dalam penyusunan ASB untuk kegiatan pengadaan alat tulis kantor, di mana mitra mampu mengendalikan biaya dengan lebih efektif dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya, kegiatan pendampingan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran di tingkat lokal. Upaya kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan mitra perlu diteruskan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran publik.

Kata kunci: analisis standar belanja; pengelolaan anggaran; indikator kinerja anggaran.

ABSTRACT

This service discusses assistance in preparing the Expenditure Standard Analysis (ASB) within the Konawe Islands Regency Government in 2019. The aim is to increase understanding of the factors that influence the amount of proposed spending and performance indicators in ASB. The implementation method includes secondary and primary data collection and analysis using the Ordinary Least Square (OLS) method. The results showed that this mentoring activity succeeded in providing an in-depth understanding to partners regarding the factors that affect the amount of proposed expenditure, such as differences in types of activities, performance targets, steps to complete activities, and activity needs: expenditure objects, unit prices, and the basis for subtraction and calculation of proposed expenditures. In addition, partners also gain a better understanding of performance indicators in ASB, including inputs, outputs, efficiency, quality, and results. The practical implementation of this science is proven in preparing ASB for office stationery procurement activities, where partners can control costs more effectively and allocate budgets as needed. In conclusion, this mentoring activity provides significant benefits in increasing budget management capacity at the local level. Collaborative efforts and mentoring between local governments and partners must continue to achieve more inclusive and sustainable development goals in public budget management.

Keywords: analysis of spending standards; budget management; budget performance indicators.

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi krusial dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah setempat. Untuk melaksanakan pengukuran kinerja dengan tepat, perlu ditetapkan indikator-indikator masukan (input) seperti dana dan sumber

daya manusia (Sumarno dkk, 2019; Ridwansyah & Arifin, 2020). Penilaian kewajaran antara masukan dan keluaran (output) yang dihasilkan merupakan hal yang esensial, dan dalam konteks ini, Analisis Standar Belanja (ASB) memiliki peran yang sangat penting (Tangkowit dkk, 2017; Nadir dkk, 2020).

ASB merujuk pada penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Urip & Indahyani, 2017; Maramis et al, 2019). Faktor-faktor yang memengaruhi ASB meliputi perbedaan output kegiatan (Tangkowit dkk, 2017), durasi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta variasi dalam objek atau rincian belanja (Khusaini, 2019). Pentingnya ASB secara formal disetujui dan diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 298 ayat (3), yang menekankan perlunya mempertimbangkan standar analisis belanja sebagai instrumen pendukung. Namun, pada tahun berjalan, terdapat kendala terkait ketersediaan baseline data Analisis Standar Belanja (ASB) di berbagai unit organisasi yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini menjadi hambatan dalam menilai kewajaran biaya atas usul program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketersediaan baseline data Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Konawe Kepulauan menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi proses penyusunannya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sistem yang terintegrasi untuk pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data terkait kegiatan dan belanja pemerintah daerah. Beberapa unit organisasi dalam pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan mungkin tidak memiliki sistem yang memadai untuk merekam dan melacak informasi terkait dengan belanja dan kinerja kegiatan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara unit-unit tersebut juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat untuk disertakan dalam Analisis Standar Belanja.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kekurangan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan ASB dengan tepat waktu dan akurat. Dalam konteks ini, terdapat keterbatasan dalam jumlah staf yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas ini, serta keterbatasan anggaran untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan yang diperlukan. Selain itu, aspek regulasi dan kebijakan yang kompleks juga dapat menjadi hambatan dalam penyusunan ASB. Ketidakjelasan dalam interpretasi regulasi atau perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat menyulitkan proses pengumpulan data dan analisis yang konsisten dan akurat (Lusianawati, 2020).

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat meningkatkan kesiapan dalam menyusun Analisis Standar Belanja yang lebih efektif dan akurat, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan ketersediaan data Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akurat dalam alokasi sumber daya serta memperkuat sistem pengelolaan data pemerintah daerah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk pendampingan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Konawe Kepulauan akan melibatkan beberapa mitra, di antaranya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan berperan dalam memberikan akses kepada data dan informasi terkait

pengeluaran belanja daerah, serta mendukung proses penyusunan dan implementasi ASB. SKPD akan menjadi mitra yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data, diskusi, dan validasi hasil penyusunan ASB. Keterlibatan SKPD dalam kegiatan ini penting untuk memastikan representasi yang komprehensif dari berbagai sektor dan program pemerintah daerah. Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk pendampingan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan pada tahapan-tahapan yang terperinci untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan arah dan tujuan dari pengabdian kepada masyarakat. Rencana kegiatan ini mencakup perencanaan waktu, anggaran, sumber daya manusia, dan strategi pelaksanaan yang akan digunakan. Dalam konteks pendampingan penyusunan ASB, rencana kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan data, jadwal pelaksanaan, serta perencanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Identifikasi Kebutuhan Data

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan untuk penyusunan ASB. Hal ini meliputi pengumpulan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait seperti Perda tentang struktur organisasi, RKA atau DPA, standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan dokumen lain yang relevan. Selain itu, juga perlu dilakukan pengumpulan data primer melalui survei dan wawancara langsung dengan SKPD terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci.

Fokus Group Discussion (FGD)

Pada tahap ini, dilakukan FGD untuk mendiskusikan dan membahas secara lebih mendalam mengenai kebutuhan dan proses penyusunan ASB (Gambar 1). Peserta FGD meliputi berbagai pihak terkait seperti perwakilan dari SKPD, akademisi, dan praktisi terkait. FGD bertujuan untuk memperoleh masukan dan sudut pandang yang beragam sehingga penyusunan ASB dapat menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi di lapangan.

Penyusunan Dokumen ASB

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi. Data sekunder dan primer yang telah terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dalam pengeluaran belanja daerah. Metode analisis ini membantu dalam menentukan cost driver dan menghitung nilai belanja yang wajar untuk setiap jenis kegiatan. Setelah data dianalisis, dilakukan penyusunan dokumen ASB sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. Dokumen ASB mencakup identifikasi kegiatan, penentuan cost driver, nilai belanja wajar, serta batasan alokasi objek belanja. Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) digunakan dalam penyusunan dokumen ASB dengan mempertimbangkan kondisi kecukupan data yang ada. Dokumen ASB yang telah disusun kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang terlibat dalam proses penyusunan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data serta kesesuaian dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Validasi dilakukan melalui diskusi dan evaluasi bersama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa dokumen ASB telah memenuhi standar yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang disusun setiap tahun dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sijabat, 2014; Londa, 2014). Proses penyusunan APBD mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Savitry et al., 2011). Dalam konteks ini, Analisis Standar Belanja (ASB) memegang peranan penting sebagai alat untuk menilai kewajaran dan efisiensi belanja daerah. Proses penyusunan APBD melibatkan berbagai tahapan, termasuk analisis standar belanja (ASB), yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini.

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Nas dkk, 2020). ASB memegang peranan penting dalam proses penganggaran, terutama dalam menentukan efisiensi dan kewajaran belanja daerah (Nas dkk, 2020). Dengan ASB, pemerintah dapat mengevaluasi hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran) kegiatan untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal (Agustin & Subardjo, 2017; Arwin dkk, 2020).

Pengetahuan Mitra terhadap Faktor yang Mempengaruhi Usulan Belanja

Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan analisis standar belanja (ASB), penting bagi mitra untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi besarnya usulan belanja. Pengetahuan yang baik tentang faktor-faktor ini membantu mitra dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efektif (Sudirman, 2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi besarnya usulan belanja berdasarkan hasil FGD, yaitu jenis kegiatan, target kinerja, langkah-langkah penyelesaian kegiatan, kebutuhan objek belanja, harga satuan, serta dasar penurunan dan penghitungan belanja.



Gambar 1. Foto bersama setelah pelaksanaan FGD.

Jenis kegiatan yang dilakukan memiliki pengaruh langsung terhadap besarnya usulan belanja. Setiap jenis kegiatan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga akan memengaruhi alokasi anggaran yang dibutuhkan (Tumbel, 2017). Mitra perlu memahami perbedaan dalam kebutuhan anggaran antara berbagai jenis kegiatan. Misalnya, kegiatan pelatihan mungkin membutuhkan anggaran lebih banyak untuk honorarium pengajar dan materi pelatihan, sementara kegiatan pembangunan membutuhkan anggaran lebih besar untuk bahan material dan biaya tenaga kerja.

Besarnya usulan belanja juga dipengaruhi oleh target kinerja yang hendak dicapai. Semakin tinggi target kinerja yang ditetapkan, semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan untuk mencapainya (Karno & Riharjo, 2018). Mitra perlu memperhatikan keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran. Mereka telah mampu mengidentifikasi dan menetapkan target kinerja yang realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Jumlah langkah atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu kegiatan juga memengaruhi besarnya usulan belanja. Semakin kompleks dan panjang langkah-langkah tersebut, semakin besar pula biaya yang diperlukan (Nangka dkk, 2018). Mitra perlu melakukan analisis terhadap proses pelaksanaan kegiatan untuk memahami jumlah langkah-langkah yang diperlukan dan dampaknya terhadap anggaran. Mereka dapat mencari cara untuk mengoptimalkan proses agar lebih efisien dan hemat biaya.

Perbedaan dalam kebutuhan objek belanja seperti jenis barang atau layanan yang dibutuhkan juga akan memengaruhi besarnya usulan belanja. Objek belanja yang lebih mahal atau spesifik akan membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar (Purwohandoyo, 2018). Mitra perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan objek belanja yang diperlukan untuk kegiatan mereka. Mereka mampu mempertimbangkan alternatif atau strategi pengadaan yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas hasil.

Penggunaan harga satuan yang berbeda untuk satu objek belanja juga akan memengaruhi total belanja yang dibutuhkan. Perbedaan harga satuan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti lokasi, waktu, atau kualitas produk (Sugianto & Rahman, 2019). Mitra perlu melakukan riset atau studi pasar untuk memahami variasi harga satuan yang ada. Mereka dapat mencari informasi tentang harga yang kompetitif atau melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik.

Dasar penghitungan usulan belanja juga akan memengaruhi besarnya anggaran yang diajukan. Penggunaan dasar penghitungan yang berbeda, seperti berdasarkan output, outcome, atau capaian program, akan menghasilkan besaran anggaran yang berbeda pula (Yulianto dkk, 2020). Mitra perlu memahami konsep dasar penghitungan usulan belanja dan implikasinya terhadap alokasi anggaran. Mereka dapat mengidentifikasi dasar penghitungan yang paling relevan dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kegiatan mereka.

Pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi besarnya usulan belanja merupakan langkah penting dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, mitra dapat mengoptimalkan alokasi anggaran, menghindari pemborosan, dan mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi mitra untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hal ini melalui pendidikan, pelatihan, atau konsultasi dengan ahli terkait.

Indikator Kinerja dalam Analisis Standar Belanja (ASB)

Penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang transparan dan disiplin menjadi kunci keberhasilan dalam penyusunan APBD. Beberapa indikator kinerja yang penting dalam analisis standar belanja (ASB) meliputi input, output, efisiensi, kualitas, dan hasil. Pengetahuan mitra tentang indikator kinerja dalam analisis standar belanja (ASB) merupakan hal yang krusial dalam memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Mitra perlu memahami pentingnya memonitor dan mengelola masukan dengan efisien. Mereka mampu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kegiatan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung masukan tersebut. Masukan (input) mengacu pada sumber daya yang digunakan dalam suatu

kegiatan atau program pemerintah (Sanjaya & Priyadi, 2019). Ini termasuk biaya personil, biaya operasional, dan biaya modal yang secara total dianggarkan dalam belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal.

Mitra dapat mengukur dan mengevaluasi keluaran kegiatan secara sistematis. Mereka perlu memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal kegiatan dan dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Keluaran (output) adalah produk dari suatu aktivitas atau kegiatan yang dihasilkan oleh satuan kerja perangkat daerah (Armala, 2020). Indikator keluaran digunakan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan dengan mengaitkannya pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan jelas.

Mitra perlu memahami pentingnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Mereka aktif mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki proses yang kurang efisien. Efisiensi mencerminkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan output yang dihasilkan (Martono, 2017; Amshari, 2019). Ini mencakup biaya per unit output yang digunakan dalam membuat ASB serta menentukan standar biayanya.

Mitra dapat mengidentifikasi harapan dan kebutuhan konsumen serta memastikan bahwa hasil kegiatan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Mereka perlu memprioritaskan pengiriman layanan atau produk yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas merujuk pada sejauh mana harapan konsumen terpenuhi dalam hal akurasi (Widayatma & Lestari, 2019), ketepatan waktu (Habena, 2019), dan kenyamanan (Rasmikayati dkk, 2020). Indikator kualitas menciptakan ukuran untuk mengevaluasi hasil kegiatan secara holistik.

Mitra memahami bahwa tujuan akhir dari kegiatan adalah untuk mencapai hasil yang signifikan bagi masyarakat. Mereka perlu terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kegiatan yang dilakukan serta melakukan perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hasil (outcome) merujuk pada dampak atau manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau program. Prinsip-prinsip penganggaran yang transparan dan disiplin sangat penting dalam mencapai tujuan hasil yang diharapkan.

Dampak yang Diperoleh oleh Mitra

Setelah kegiatan selesai, mitra dapat mengalami sejumlah dampak yang dapat memengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Dampak ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung dari implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu dampak langsung dari kegiatan pengabdian adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra. Melalui pelatihan, workshop, atau program edukasi lainnya, mitra dapat memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha atau aktivitas lainnya. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan mitra dapat meningkatkan produktivitas dalam usaha atau kegiatan yang mereka jalankan. Hal ini menghasilkan peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi bagi mitra serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Melalui kegiatan pengabdian, mitra juga dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk usaha atau aktivitas mereka. Hal ini dapat berupa akses terhadap informasi, teknologi, pasar, modal, atau sumberdaya lainnya yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Kegiatan pengabdian sering kali melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk mitra, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, mitra dapat memperluas jaringan dan membangun hubungan kerjasama yang membantu mereka dalam mengembangkan usaha atau aktivitas mereka di masa mendatang.

Selain dampak langsung bagi mitra, kegiatan pengabdian juga dapat memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan partisipatif dan penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai isu yang relevan dengan kegiatan tersebut (Maulana dkk, 2020), seperti kesehatan, lingkungan, atau pendidikan (Maulana dkk, 2020).

Secara keseluruhan, diharapkan bahwa dampak dari kegiatan pengabdian dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mitra serta masyarakat secara umum. Dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumberdaya, dan jaringan kerjasama, diharapkan dapat terwujud perubahan yang signifikan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah yang dilayani oleh kegiatan pengabdian tersebut.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019 telah memberikan manfaat yang signifikan. Mitra berhasil memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya usulan belanja dan indikator kinerja dalam ASB. Implementasi praktis dari pengetahuan ini terbukti dalam penyusunan ASB untuk kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Melalui proses ini, mitra mampu mengendalikan biaya dengan lebih efektif dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam penyusunan ASB tahun 2019, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk peningkatan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di masa depan. Penting untuk terus mendorong kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan mitra guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran publik.

REFERENSI

- Agustin, R. D., & Subardjo, A. (2017). Konsep value for money dalam mengukur kinerja pelayanan sektor publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Amshari, M. M. (2019). Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 133-148.
- Armala, S. (2020). Implementasi PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), 11-21.
- Arwin, M. A., Sumaryadi, I. N., & Lambelanova, R. (2020). Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(3), 323-335.
- Habena, A. R. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Pasien BPJS di Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(2).
- Karno, D., & Riharjo, I. B. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).
- Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Lusianawati, H. (2020). Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 22-40.

- Maramis, J. B., Lengkong, V. P., Nelwan, O. S., & Sepang, J. L. (2019). Human and Non-Human Aspects in the Effectiveness of the Implementation of the Shopping Standard Analysis (ASB) on the Village Fund Project in Coastal Areas of North Minahasa Regency. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, 4(1), 83-92.
- Martono, C. (2017). Fungsi Anggaran sebagai Pengendalian Manajemen terhadap Efisiensi Pusat-pusat Laba. *Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi*, 2(3).
- Maulana, H., Yudhistira, S., & Komalasari, G. (2020, December). Pengembangan Website Bumikita. Life Sebagai Media Psikoedukasi Perilaku Pro-Lingkungan Bagi Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, pp. SNPPM2020SH-45).
- Nadir, R., Arif, M. R., & Fatmawati, F. (2020). Modelling Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Di Sulawesi Selatan). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 197-205.
- Nangka, C. I., Sibi, M., & Mangare, J. B. (2018). Perataan Tenaga Kerja Pada Proyek Bangunan Dengan Menggunakan Microsoft Project (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Terminal Akap Tangkoko Bitung). *Jurnal Sipil Statik*, 6(11).
- Nas, U., Suun, M., & Nasaruddin, F. (2020). Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 3(2), 76-82.
- Purwohandoyo, A. (2018). Analisis Perbandingan Biaya Pengelolaan Limbah Medis Padat Antara Sistem Swakelola dengan Sistem Outsourcing di Rumah Sakit Kanker "Dharmais". *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 2(3).
- Rasmikayati, E., Saefudin, B. R., Karyani, T., Kusno, K., & Rizkiansyah, R. (2020). Analisis faktor dan tingkat kepuasan ditinjau dari kualitas produk dan pelayanan pada konsumen sayuran organik di lotte mart Kota Bandung. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 351-364.
- Ridwansyah, R. A., & Arifin, M. Z. (2020). Studi Tentang Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur.
- Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. (2019). Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Sudirman, E. (2020). Strategi Usaha Kecil Menghadapi Digitalisasi Pemasaran. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 142-151.
- Sugianto, A., & Rahman, S. (2019). Pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian lampu shinyoku di cv. Sinar abadi pekanbaru. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(2), 174-184.
- Sumarno, S., Purwanto, W., & Nugroho, M. A. S. (2019). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Tangkowit, R. H., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumuluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Urip, T. P., & Indahyani, R. (2017). Analisis flypaper effect pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(2).
- Widayatma, C. P., & Lestari, S. P. (2019). Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening (Studi kasus pada Rifa Kuliner Kendal). *Serat Acitya*, 7(3), 25.
- Yulianto, J. R., Lestari, N. A., Hartanto, H., & Febrianto, A. M. (2020). Evaluation of The Implementation of The Cost Structural Standard Policy. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(1), 22-22.